POLICY BRIEF:

CATATAN KRITIS PENDIDIKAN NONFORMAL INDONESIA

Menata Ulang Peran PKBM: Dari Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Menuju Pusat Transformasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Disampaikan sebagai gagasan strategis dalam Musyawarah Nasional FK PKBM Indonesia 2026

Surabaya, 6–10 November 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan nonformal memiliki posisi strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja, pendidikan nonformal seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan belajar, mengembangkan kompetensi, dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi tersebut. Melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, PKBM memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.

Namun, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian bersama: apakah pengembangan PKBM selama ini telah bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks?
PKBM berisiko terjebak pada orientasi administratif dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan semata, sementara fungsi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, dan penguatan kemandirian ekonomi belum selalu menjadi bagian yang terintegrasi dalam penyelenggaraan program.

Persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada pengelola PKBM. Ada dimensi kebijakan, tata kelola, pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, relevansi kurikulum, serta hubungan antara pendidikan nonformal dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Policy brief ini menawarkan reposisi PKBM sebagai **Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pemberdayaan Masyarakat (Community Learning and Empowerment Center)**.

Diperlukan perubahan pendekatan dari sekadar memastikan terselenggaranya program pendidikan menuju penyelenggaraan layanan pembelajaran yang menghasilkan peningkatan kapasitas, kompetensi, produktivitas, dan kemandirian masyarakat.

1. KONTEKS DAN PERSOALAN STRATEGIS

Pendidikan nonformal lahir dari kebutuhan masyarakat yang tidak seluruhnya dapat dilayani oleh sistem pendidikan formal.
Kelompok pekerja, anak tidak sekolah, masyarakat putus sekolah, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, serta kelompok yang membutuhkan keterampilan khusus memerlukan model pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan adaptif.

Dalam konteks tersebut, PKBM memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi memahami kebutuhan lokal. Akan tetapi, kedekatan dengan masyarakat belum otomatis menjamin kualitas layanan pendidikan.
Setidaknya terdapat lima persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, persoalan orientasi kelembagaan.
Sebagian penyelenggaraan PKBM masih berorientasi pada pemenuhan layanan pendidikan kesetaraan. Padahal, kebutuhan warga belajar tidak berhenti setelah memperoleh ijazah.

Masyarakat membutuhkan keterampilan kerja, kemampuan berwirausaha, literasi digital, kecakapan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi.

Pertanyaannya: sudahkah PKBM memiliki orientasi pengembangan masyarakat yang terintegrasi dengan layanan pendidikan kesetaraan?

Kedua, persoalan kualitas pembelajaran.
Pendidikan kesetaraan tidak seharusnya menjadi pendidikan formal yang sekadar dipindahkan ke lingkungan nonformal.

Karakteristik warga belajar PKBM berbeda-beda. Ada yang bekerja, mengurus keluarga, memiliki pengalaman kerja, memiliki keterampilan praktis, atau memiliki keterbatasan waktu belajar.

Karena itu, pendekatan pembelajaran perlu mempertimbangkan pengalaman hidup, kebutuhan individual, potensi lokal, dan konteks sosial warga belajar. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari kelulusan dan perolehan ijazah, tetapi juga dari perkembangan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan.

Ketiga, persoalan profesionalisme dan keberlanjutan sumber daya manusia.
Tutor merupakan salah satu unsur penentu mutu pendidikan nonformal. Namun, profesionalisme tutor perlu didukung oleh sistem pengembangan kompetensi, kepastian peran, penghargaan yang layak, dan lingkungan kerja yang mendukung.

Tuntutan terhadap kualitas pembelajaran tidak akan berkelanjutan apabila tidak disertai perhatian terhadap kondisi dan kesejahteraan pendidiknya.

Keempat, persoalan tata kelola dan keberlanjutan kelembagaan.
PKBM membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.

Administrasi kelembagaan, pengelolaan keuangan, manajemen tutor, sistem pembelajaran, evaluasi program, dan kemitraan perlu dikembangkan sebagai satu kesatuan.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana lembaga dapat mempertahankan keberlanjutan operasional tanpa kehilangan orientasi pelayanan pendidikan masyarakat.

Kelima, persoalan relevansi dengan kebutuhan pembangunan.
Pendidikan nonformal harus memiliki hubungan yang lebih kuat dengan potensi ekonomi lokal, kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan agenda pembangunan daerah.

Keterampilan yang diajarkan harus memiliki nilai guna bagi kehidupan warga belajar.

PKBM perlu bergerak melampaui penyelenggaraan pembelajaran di ruang kelas menuju pembelajaran berbasis pengalaman, produksi, praktik kerja, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. ANALISIS KRITIS: PERSOALAN PENDIDIKAN NONFORMAL BUKAN HANYA PERSOALAN PKBM

Ada kecenderungan untuk menilai kualitas pendidikan nonformal berdasarkan kemampuan masing-masing lembaga memenuhi ketentuan administrasi dan standar penyelenggaraan.

Keduanya penting. Namun, pendekatan tersebut belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pendidikan nonformal secara menyeluruh.
Kita perlu membedakan tiga dimensi kualitas.

A. Kualitas kepatuhan (compliance quality)

Mengukur sejauh mana lembaga memenuhi persyaratan perizinan, administrasi, standar penyelenggaraan, pelaporan, dan ketentuan yang berlaku.

B. Kualitas proses (process quality)

Mengukur kualitas pembelajaran, kompetensi tutor, interaksi dengan warga belajar, relevansi materi, serta pelaksanaan program pemberdayaan.

C. Kualitas dampak (impact quality)

Mengukur perubahan nyata yang dialami warga belajar setelah mengikuti pendidikan, seperti peningkatan kompetensi, kesempatan melanjutkan pendidikan, produktivitas, kemandirian, dan partisipasi sosial.
Ketiga dimensi tersebut harus berjalan bersama.

PKBM yang tertib administrasi belum tentu memiliki pembelajaran berkualitas. PKBM yang memiliki kegiatan pembelajaran belum tentu menghasilkan dampak pemberdayaan yang signifikan.

Sebaliknya, praktik pemberdayaan yang baik juga membutuhkan sistem kelembagaan yang tertib agar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pendidikan nonformal perlu bergeser dari pendekatan yang dominan administratif menuju pendekatan yang mengintegrasikan kepatuhan, kualitas proses, dan dampak.

3. AGENDA REPOSISI PKBM INDONESIA

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan agenda transformasi kelembagaan yang berorientasi pada lima bidang.

1. Transformasi fungsi kelembagaan

PKBM perlu diperkuat sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan ekonomi, literasi, dan pengembangan kompetensi.

2. Transformasi pembelajaran

Pembelajaran harus lebih kontekstual, fleksibel, berbasis pengalaman, dan berorientasi pada kompetensi.
Pengalaman kerja, keterampilan, dan potensi warga belajar perlu menjadi sumber pembelajaran yang dihargai.

3. Transformasi profesionalisme tutor

Diperlukan pengembangan kompetensi berkelanjutan, komunitas belajar tutor, peningkatan kemampuan digital, serta sistem penghargaan yang memperhatikan kontribusi dan tanggung jawab pendidik.

4. Transformasi tata kelola

Penguatan manajemen berbasis mutu, transparansi, sistem administrasi digital, evaluasi berkala, dan pengembangan kemitraan perlu menjadi agenda kelembagaan.

5. Transformasi kemitraan dan pemberdayaan

PKBM harus memiliki hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pemerintah desa, dan komunitas lokal.

Kemitraan tidak cukup berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Harus ada kegiatan, dukungan sumber daya, dan hasil yang dapat diukur.

4. REKOMENDASI KEBIJAKAN

MUNAS FK PKBM Indonesia perlu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan organisasi, tetapi juga pada perbaikan ekosistem pendidikan nonformal nasional.

Berikut lima rekomendasi utama.

Rekomendasi 1: Menyusun Peta Jalan Transformasi PKBM Indonesia 2026–2031.

FK PKBM Indonesia perlu menginisiasi peta jalan pengembangan PKBM yang memiliki indikator capaian, target tahunan, strategi pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

Rekomendasi 2: Mendorong penguatan kebijakan pembiayaan pendidikan nonformal.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kecukupan, ketepatan sasaran, fleksibilitas, dan keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Dukungan pembiayaan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata layanan pendidikan, kondisi geografis, karakteristik warga belajar, serta kualitas pembelajaran.

Rekomendasi 3: Membangun sistem pengembangan profesionalisme tutor.

FK PKBM perlu mengembangkan agenda peningkatan kompetensi tutor melalui pelatihan, pendampingan, pertukaran praktik baik, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Rekomendasi 4: Mengembangkan sistem pemetaan dan evaluasi dampak PKBM.

Pengukuran keberhasilan lembaga perlu melampaui jumlah peserta didik dan lulusan.

Indikator juga perlu memperhatikan keberlanjutan pendidikan, peningkatan kompetensi, kemandirian, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi warga belajar.

Rekomendasi 5: Memperkuat posisi strategis FK PKBM dalam advokasi kebijakan.

FK PKBM perlu menjadi organisasi yang tidak hanya menghimpun dan mengoordinasikan lembaga, tetapi juga menghasilkan kajian, menyampaikan aspirasi berbasis data, membangun komunikasi kebijakan, serta mengawal implementasi kebijakan pendidikan nonformal.

5. AGENDA STRATEGIS LIMA TAHUN: 2026–2031

Transformasi pendidikan nonformal tidak dapat dilakukan melalui program sesaat. Diperlukan tahapan yang sistematis.

Tahapan	Fokus strategis	Indikator arah keberhasilan
2026–2027	Konsolidasi dan pemetaan	Tersedia data kondisi PKBM dan peta kebutuhan pengembangan
2027–2028	Penguatan mutu	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kompetensi tutor
2028–2029	Pemberdayaan	Meningkatnya program kecakapan hidup dan kemitraan produktif
2029–2030	Integrasi jejaring	Terbangunnya kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan
2030–2031	Kemandirian dan dampak	Tersedianya model PKBM berkelanjutan dan pengukuran dampak masyarakat

Peta jalan ini perlu diterjemahkan menjadi program kerja organisasi, dukungan kebijakan pemerintah, dan rencana aksi masing-masing PKBM.

6. PERTANYAAN KRITIS UNTUK MUNAS FK PKBM INDONESIA

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan diskusi dan pengambilan keputusan.

1. Apakah FK PKBM Indonesia telah memiliki visi jangka panjang yang mampu menjawab perubahan kebutuhan pendidikan nonformal?
2. Bagaimana memastikan PKBM tidak hanya menjadi penyelenggara pendidikan kesetaraan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat?

3. Bagaimana memperjuangkan pembiayaan yang lebih berkeadilan bagi penyelenggara pendidikan nonformal?
4. Bagaimana membangun sistem peningkatan kompetensi dan penghargaan bagi tutor?
5. Bagaimana memastikan setiap keputusan MUNAS memiliki target, indikator, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi?
6. Bagaimana FK PKBM memastikan suara PKBM daerah, termasuk lembaga kecil dan yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses, terwakili dalam kebijakan nasional?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kualitas sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusannya, tetapi juga oleh kemampuannya menjawab persoalan anggota dan masyarakat yang dilayaninya.

7. PENUTUP: SAATNYA PKBM MELANGKAH LEBIH JAUH

Masa depan pendidikan nonformal Indonesia tidak cukup dibangun melalui penambahan jumlah lembaga, penyelenggaraan kegiatan, atau pemenuhan kewajiban administratif. Diperlukan perubahan cara pandang terhadap fungsi, posisi, dan kontribusi PKBM dalam pembangunan manusia.

PKBM harus tetap menjadi ruang pendidikan yang terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan kedua, tetapi pada saat yang sama harus mampu memberikan kesempatan pertama bagi banyak orang untuk menemukan potensi, mengembangkan keterampilan, dan membangun masa depan.

MUNAS FK PKBM Indonesia 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah perjuangan organisasi. Bukan sekadar menghasilkan kepengurusan baru dan program kerja, melainkan membangun komitmen kolektif untuk memperkuat kualitas pendidikan nonformal Indonesia.

Sebab, keberhasilan PKBM bukan semata-mata diukur dari berapa banyak warga belajar yang memperoleh ijazah, tetapi juga dari berapa banyak kehidupan yang berubah menjadi lebih baik melalui proses pendidikan.

PKBM bukan sekadar tempat belajar. PKBM adalah ruang tumbuh, ruang berdaya, dan ruang perubahan masyarakat.

Catatan penyusunan: Naskah ini merupakan rancangan gagasan kebijakan untuk bahan diskusi MUNAS FK PKBM Indonesia 2026. Rekomendasi di dalamnya merupakan usulan, bukan keputusan organisasi atau pernyataan resmi pemerintah.

Diberdayakan dengan AI oleh Khoirul Anwar
Founder Yayasan Puspa Sada Setara
Tutor PKBM LENTERA NUSANTARA